

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

PSAK No. 1 menyatakan bahwa laporan keuangan diartikan sebagai posisi keuangan dan kinerja keuangan yang disajikan secara terstruktur oleh suatu entitas perusahaan, dimana laporan keuangan tersebut digunakan sebagai cara bagi perusahaan dalam menyampaikan informasi keuangan sehubungan dengan kewajiban manajemen dalam memperoleh informasi tentang pelaksanaan kinerja perusahaan. Hal ini karena informasi yang disampaikan menggambarkan keadaan perusahaan secara keseluruhan, sehingga klien dapat mengetahui keadaan perusahaan melalui laporan keuangan yang dikeluarkan perusahaan. Para pemakai laporan keuangan akan memfokuskan pada laporan laba rugi, karena mereka dapat melihat fluktuasi laba perusahaan.

Informasi laba digunakan oleh pihak eksternal perusahaan terutama investor dalam mempertimbangkan dan menentukan pilihan apakah akan memasukkan sumber daya ke dalam perusahaan atau tidak, karena alasan investor berinvestasi yaitu untuk menghasilkan keuntungan dan mengembangkan sumber daya mereka (Rahmadani & Cahyonowati, 2022). Angka laba pada perusahaan bisa diakibatkan karena tindakan manajemen laba yang dilakukan oleh manajer, agar laporan keuangan terlihat baik di mata para investor dan masyarakat.

Manajemen laba ini sering melibatkan laporan keuangan, terutama pada angka laba. Manajemen laba bisa bersifat *cosmetic*, di mana manajer memanipulasi secara akrual tanpa konsekuensi arus kas. Manajemen laba juga dapat bisa bersifat real, di mana manajer mengambil tindakan dengan konsekuensi arus kas untuk tujuan mengelola laba (Subramanyam, 2017).

Manajemen laba masih kerap terjadi di Indonesia, salah satu kasus tersebut terjadi pada perusahaan manufaktur tahun 2017 yang dilakukan oleh PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. Adapun tindakan manipulasinya berupa enam perusahaan distributor afiliasi yang ditulis merupakan pihak ketiga, dan adanya penggelembungan (*overstatement*) piutang dari enam perusahaan tersebut dengan nilai mencapai Rp 1,4 triliun. Hakim Akhmad juga menyebutkan adanya aliran dana dari perseroan senilai Rp 1,78 triliun kepada manajemen. Kasus ini berakhir dengan dua mantan direksi PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk yakni, Joko Mogoginta dan Budhi Istansto yang divonis hukuman penjara masing-masing selama empat tahun dan denda sebesar Rp 2 miliar subsidi 3 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Mahadi, 2021).

Selain itu, manajemen laba juga terjadi pada perusahaan BUMN yaitu PT Garuda Indonesia (Persero), yang mana kinerja keuangan perusahaan tersebut berhasil membukukan laba bersih US\$809 ribu pada 2018, berbanding terbalik dari 2017 yang merugi US\$216,58 juta. Tindakan yang dilakukan oleh manajemen yaitu mengakui pendapatan dari penjualan saham anak perusahaan PT Mahata Aero Teknologi sebagai pendapatan operasional,

padahal transaksi tersebut lebih tepat diperlakukan sebagai pendapatan di luar usaha utama perusahaan. Garuda Indonesia juga mencatat piutang dari PT Mahata Aero Teknologi sebesar Rp 2,8 triliun dalam laporan keuangan. Namun, piutang tersebut diduga fiktif dan tidak ada bukti konkret atas transaksi yang mendasarinya (Pratiwi, 2019).

Dalam sektor perbankan, terjadi kasus manajemen laba di PT Bank Bukopin Tbk (BBKP) pada tahun 2018. Manajemen Bukopin secara terbuka melakukan revisi terhadap laporan keuangan untuk tahun 2015, 2016, dan 2017. Salah satu revisi yang paling mencolok adalah penurunan laba bersih tahun 2016 yang direvisi dari Rp 1,08 triliun menjadi Rp 183,56 miliar. Penurunan yang signifikan terutama terjadi pada pendapatan dari provisi dan komisi, yang merupakan pendapatan dari kartu kredit. Pendapatan ini anjlok dari Rp 1,06 triliun menjadi Rp 317,88 miliar karena adanya pencatatan yang tidak wajar; perusahaan masih mencatatkan pendapatan dari bisnis kartu kredit meskipun kenyataannya tidak ada. Selain isu terkait kartu kredit, revisi juga dilakukan pada pembiayaan anak perusahaan Bank Syariah Bukopin (BSB) berkaitan dengan penambahan saldo cadangan kerugian penurunan nilai untuk debitor tertentu. Akibat dari revisi ini, beban penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan mengalami kenaikan dari Rp 649,05 miliar menjadi Rp 797,65 miliar. Hal ini mengakibatkan peningkatan beban perseroan sebesar Rp 148,6 miliar (Haryanto, 2018).

Manajemen laba tidak hanya terjadi di Indonesia saja, namun juga terjadi di perusahaan-perusahaan besar luar negeri seperti perusahaan

Olympus yang berada di Tokyo. Olympus telah menyembunyikan kerugian investasi di perusahaan sekuritas selama beberapa dekade, sejak era 1980-an. Untuk menutupi kerugiannya, perusahaan ini melakukan penyelewengan dana akuisisi. Pengungkapan ini dilatarbelakangi oleh tuntutan dari mantan CEO Olympus, Michael Woodford, yang dipecat pada 14 Oktober 2011. Woodford meminta agar perusahaan yang telah beroperasi selama 92 tahun ini memberikan penjelasan mengenai transaksi mencurigakan senilai US\$ 1,3 miliar, atau sekitar Rp 11 triliun. Selanjutnya, Olympus menemukan sejumlah dana yang mencurigakan terkait akuisisi produsen peralatan medis asal Inggris, Gyrus, yang dilakukan pada tahun 2008 dan bernilai US\$ 2,2 miliar (sekitar Rp 18,7 triliun), yang juga melibatkan biaya penasihat US 687 juta (Rp 5,83 triliun) dan pembayaran kepada tiga perusahaan investasi lokal US\$ 773 juta (Rp 6,57 triliun). Dana-dana tersebut ternyata digunakan untuk menutupi kerugian investasi di masa lalu, hal itu terlihat sangat gamblang ketika dalam beberapa bulan kemudian, pembayaran kepada tiga perusahaan investasi lokal itu dihapus dari buku. Presiden Direktur Olympus Shuichi Takayama menuding Tsuyoshi Kikukawa, yang mundur dari jabatan Presiden dan Komisaris Olympus pada 26 Oktober 2011, sebagai pihak yang bertanggung jawab (Detikfinance.com, 2011).

Perusahaan lainnya yang melakukan manajemen laba di Tokyo yaitu Toshiba yang merupakan perusahaan elektronik asal Jepang. Toshiba terbukti melakukan pembohongan publik dan investor dengan cara menggelembungkan keuntungan di laporan keuangan hingga overstated profit

1,2 Miliar US Dollar sejak tahun fiskal 2008. Guna mempercantik kinerja keuangannya, Toshiba melakukan berbagai cara baik mengakui pendapatan lebih awal atau menunda pengakuan biaya pada periode tertentu namun dengan metode yang menurut investigator tidak sesuai prinsip akuntansi. Seperti kesalahan penggunaan *percentage-of-completion* untuk pengakuan pendapatan proyek, *cash-based* ketika pengakuan provisi yang seharusnya dengan metode akrual, memaksa supplier menunda penerbitan tagihan meski pekerjaan sudah selesai, dan lain sebagainya guna meninggikan angka laba. Sejak laporan audit penginvestigasian resmi dirilis dua bulan setelah komite yang diketuai Koichi Ueda dan beranggotakan beberapa pakar akuntansi Jepang menginvestigasi Toshiba dan sampai pada kesimpulan telah terjadi penyimpangan. Pada 21 Juli 2015, delapan dari 16 petinggi Toshiba yang terlibat skandal akuntansi resmi mengundurkan diri. Termasuk diantaranya Presiden Direktur Hisao Tanaka, Wakil Presdir Norio Sasaki dan Chief Executive Atsutoshi Nishida (Minarahayu, 2016).

Manajemen laba juga melibatkan perusahaan besar Apple di Korea Selatan, dimana Apple Korea diduga memanipulasi laporan keuangannya untuk meminimalisir setoran pajak penghasilan (PPh) badan. Anggota parlemen Korsel, Yang Jeong-Sook mengatakan Apple telah memanipulasi rasio laba terhadap total penjualan (*operating profit margin*) untuk membayar pajak dengan nominal lebih rendah. Apple Korea diduga terlibat dalam pengaturan harga transfer untuk memindahkan laba ke cabang luar negeri

dengan tarif pajak lebih rendah, untuk mengurangi pajak yang harus dibayar di Korea Selatan (Herdon, 2022).

Manajemen laba dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya *Corporate Governance*. *Corporate governance* merupakan mekanisme untuk mengurangi konflik keagenan antara manajer dan pemegang saham, mekanisme *corporate governance* yang efektif dapat mengurangi peluang manajer untuk melakukan manajemen laba. Pada penelitian ini mekanisme tata kelola perusahaan diwakili oleh kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional. Dalam teori agensi, kepemilikan manajerial dapat mengurangi konflik keagenan antara manajer dan pemegang saham. Semakin besar kepemilikan manajerial, maka semakin besar insentif manajer untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan mengurangi perilaku oportunistik seperti manajemen laba. Sama halnya dengan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dalam tata kelola perusahaan merupakan mekanisme yang penting. Kepemilikan institusional memiliki insentif dan kemampuan untuk melakukan pengawasan yang lebih efektif terhadap manajemen perusahaan. Sehingga pengawasan yang ketat dari pemilik institusi telah menyembunyikan kerugian investasi di perusahaan sekuritas selama beberapa dekade, sejak era 1980-an. Untuk menutupi kerugiannya, perusahaan ini melakukan penyelewengan dana akuisisi. Pengungkapan ini dilatarbelakangi oleh tuntutan dari mantan CEO Olympus, Michael Woodford, yang dipecat pada 14 Oktober 2011. Woodford meminta agar perusahaan yang telah beroperasi selama 92 tahun ini memberikan

penjelasan mengenai transaksi mencurigakan senilai US\$ 1,3 miliar, atau sekitar Rp 11 triliun. Selanjutnya, Olympus menemukan sejumlah dana yang mencurigakan terkait akuisisi produsen peralatan medis asal Inggris, Gyrus, yang dilakukan pada tahun 2008 dan bernilai US\$ 2,2 miliar (sekitar Rp 18,7 triliun).sional dapat mengurangi peluang manajemen untuk melakukan tindakan manajemen laba.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial memiliki pengaruh negatif terhadap praktik manajemen laba. Penelitian oleh Pattiruhu et al., (2022), dan Maryati et al., (2022) mendukung temuan ini. Dengan adanya kepemilikan saham oleh pihak manajemen, kepentingan antara manajemen dan pemegang saham dapat diselaraskan, sehingga mengurangi potensi terjadinya tindakan yang menguntungkan diri sendiri. Dalam kondisi ini, manajemen terdorong untuk meningkatkan kualitas pelaporan dengan cara menyajikan laporan keuangan yang akurat demi menjaga reputasi perusahaan. Akibatnya, praktik manajemen laba menjadi minim.

Namun penelitian yang dilakukan oleh Suheny (2019), Devanka et al., (2022), Candra & Rosyadi (2021), Fidelia & Ardillah (2022), SURIANTI et al., (2021), Mwangi & Nasieku (2022), dan Rahman et al., (2021) bertentangan dengan hasil penelitian sebelumnya. Mereka mengungkapkan hasil bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, hal ini berarti dengan adanya peningkatan ataupun penurunan kepemilikan manajerial dalam suatu perusahaan, belum mampu mengurangi adanya

manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan. Jumlah kepemilikan manajerial yang rendah menyebabkan pihak manajemen perusahaan cenderung mengambil kebijakan untuk mengelola laba perusahaan.

Suheny (2019), Rahmadani & Cahyonowati (2022), SURIANTI et al., (2021), dan Ugo et al., (2022) mengungkapkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kepemilikan saham investor institusional, maka akan menyebabkan semakin rendah perilaku oportunistik manajer untuk melakukan manajemen laba. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Cinthya et al., (2022), Anggraeni & Adiwijaya (2020), dan Mwangi & Nasieku (2022) mengungkapkan hasil sebaliknya, yaitu kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Hal ini dijelaskan bahwa meskipun jumlah saham yang dimiliki institusional meningkat, namun tidak menjamin dapat mengurangi praktek manajemen laba yang terjadi.

Selain *corporate governance*, *leverage* juga dapat mempengaruhi manajemen laba. Dalam hipotesis biaya politik, perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi cenderung lebih disorot oleh kreditor, pemerintah, dan publik. Hal tersebut yang membuat manajemen mungkin termotivasi untuk melakukan manajemen laba agar dapat menurunkan profil risiko perusahaan di mata pemangku kepentingan eksternal. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Suheny (2019), Devanka et al., (2022), Cinthya et al., (2022), Anggraeni & Adiwijaya (2020), Asim & Ismail (2019), serta Mamidu & Ishola (2023)

mengungkapkan hasil bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Kondisi ini terjadi karena perusahaan yang memiliki *leverage* yang tinggi akan berusaha untuk terlihat baik di mata kreditur, semakin tingginya tingkat hutang yang dimiliki oleh suatu perusahaan, maka semakin terdorongnya manajemen untuk melakukan manipulasi laba agar citra perusahaan terlihat baik di mata masyarakat dan agar investor tetap mau berinvestasi di perusahaan tersebut.

Namun hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hanandika et al., (2023), yang mengungkapkan hasil bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Dimana Semakin besar tingkat leverage maka semakin kecil tingkat manajemen laba, berlaku juga untuk sebaliknya. Hasil penelitian lain juga ada yang mengungkapkan hasil berbeda, seperti penelitian yang dilakukan oleh Irawan (2019), serta Candra & Rosyadi, (2021), yang menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

Beberapa peneliti menyatakan bahwa konservatisme akuntansi juga dapat berperan sebagai mekanisme pengawasan yang membatasi perilaku oportunistik manajemen dalam melakukan manajemen laba, karena dengan menerapkan konsep kehati-hatian dalam pengakuan dan pengukuran aset, liabilitas, pendapatan, dan beban. Hal ini dapat mengurangi insentif dan peluang bagi manajemen untuk melakukan manajemen laba. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan Maryati et al., (2022) dan Fuad (2019), yang menyatakan bahwa konservatisme berpengaruh negatif

terhadap manajemen laba. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Fidelia & Ardillah (2022) dan Surianti et al., (2021) menyatakan bahwa tidak adanya pengaruh terhadap manajemen laba. Hal ini disebabkan karena konservatisme akuntansi memaksa pengakuan keuntungan, dalam hal ini dapat mengurangi celah bagi pihak manajer untuk melakukan praktik manajemen laba. Sehingga dengan menerapkan kebijakan akuntansi konservatisme dapat mencegah perusahaan melakukan tindakan yang membesar-besarkan laba.

Selain konservatisme akuntansi, peneliti lainnya juga menyatakan bahwa perencanaan pajak merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi manajemen laba, perusahaan melakukan perencanaan pajak untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayar, hal ini bertujuan untuk memanfaatkan celah-celah dan ketentuan dalam peraturan perpajakan secara optimal. Terdapat hasil penelitian yang menyebutkan bahwa perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap manajemen laba, seperti penelitian yang dilakukan oleh Jeradu (2021). Manajer melakukan perencanaan pajak untuk memaksimalkan kepentingan pribadi mereka, seperti bonus, pembatasan utang, dan biaya politik. Sehingga dapat dikatakan bahwa semakin tinggi perencanaan pajak maka semakin tinggi peluang manajemen untuk melakukan manajemen laba. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Amin et al., (2019), Syaddyah et al., (2020) dan Ramdani & Musdhalifah (2021) yang menyatakan bahwa perencanaan pajak tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Tidak adanya hubungan yang signifikan antara perencanaan pajak dan manajemen laba disebabkan

karena perusahaan tidak melakukan perencanaan pajak sehingga tidak adanya praktik manajemen laba yang terjadi

Berdasarkan penjabaran di atas, peneliti melihat adanya gap penelitian antara pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, *leverage*, konservatisme akuntansi, dan perencanaan pajak terhadap manajemen laba. Dimana ditemukannya hasil yang inkonsistensi atau kontradiksi pada penelitian terdahulu dan masih minimnya penelitian yang menguji lima variabel sekaligus. Oleh sebab itu, peneliti melakukan penelitian yang berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Laba pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”.

1.2 Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian

Peneliti terdahulu telah banyak melakukan analisis dan pengujian mengenai pengaruh *Good Corporate Governance*, *Leverage*, Konservatisme Akuntansi, dan Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba pada perusahaan manufaktur.

Dari banyaknya penelitian terdahulu yang telah melakukan analisis dan pengujian, hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan adanya kesenjangan dari hasil penelitian terdahulu. Oleh sebab itu, penulis merumuskan pertanyaan penelitian mengenai pengaruh *Good Corporate Governance*, *Leverage*, Konservatisme Akuntansi, dan Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba pada perusahaan manufaktur untuk mengonfirmasi kembali atas penelitian yang dilakukan, yaitu sebagai berikut :

1. Apakah Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur?
2. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur?
3. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur?
4. Apakah Konservatisme Akuntansi berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur?
5. Apakah Perencanaan Pajak berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis dan menguji pengaruh *Corporate Governance* yang terdiri dari kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional terhadap Manajemen Laba pada perusahaan Manufaktur yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Menganalisis dan menguji pengaruh *Leverage* terhadap Manajemen Laba pada perusahaan Manufaktur yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Menganalisis dan menguji pengaruh Konservatisme Akuntansi terhadap Manajemen Laba pada perusahaan Manufaktur yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

4. Menganalisis dan menguji pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba pada perusahaan Manufaktur yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian, rumusan masalah dan pertanyaan penelitian, serta tujuan penelitian yang sudah dijelaskan di atas. Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi akademis dan praktis, yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori agensi dengan menganalisis bagaimana konflik kepentingan antara prinsipal (pemilik) dan agen (manajer) dapat memicu praktik manajemen laba. Penelitian ini juga diharapkan dapat mendukung teori akuntansi positif melalui hipotesis umum, dimana manajer perusahaan cenderung akan memilih metode akuntansi yang dapat meningkatkan manajemen laba. Sehingga penelitian ini membantu menambah literatur mengenai manajemen laba untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Membantu investor memahami risiko manajemen laba dan mengevaluasi kualitas laba perusahaan dengan lebih baik, serta memungkinkan investor membuat keputusan investasi yang lebih baik.

- b. Memberikan wawasan bagi kreditor untuk menilai risiko kredit terkait praktik manajemen laba di perusahaan, dan membantu kreditor menetapkan syarat dan ketentuan kredit yang lebih tepat.
- c. Memberikan masukan bagi regulator untuk memperkuat peraturan dan pengawasan terkait praktik manajemen laba, dan membantu regulator mengembangkan standar akuntansi yang lebih efektif dalam membatasi manajemen laba.
- d. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan terhadap publik dan melindungi kepentingan publik dari dampak negatif praktik manajemen laba yang merugikan.

Secara keseluruhan, penelitian ini dapat membantu pihak-pihak eksternal dalam membuat keputusan yang lebih tepat, meningkatkan pengawasan, dan mendorong praktik pelaporan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip akuntansi.

